



# **WALIKOTA PADANG**

## **PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 426 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PADANG TAHUN 2014**

#### **WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD diberikan bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah setiap Tahunnya secara Proposional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tanggal 9 Juli 2014, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 241 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Padang Tahun 2014 perlu diubah dan diperbaiki;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Padang Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan lembaran Negara Nomor 5351);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05 );
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 27.A Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 27.A);
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 8);

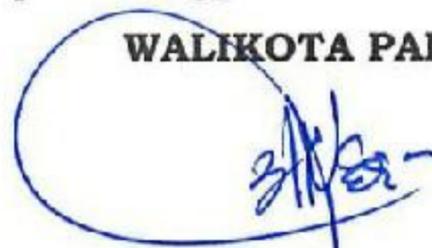
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Padang;
- KETIGA** : Jika Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud diktum Kedua, dikenakan sanksi Administrasi berupa penghentian bantuan keuangan.
- KEEMPAT** : Partai Politik yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan bantuan keuangan dalam Tahun Anggaran berkenan, sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kode Rekening 5.2.1.7.05.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 241 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Padang Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 Oktober 2014

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala DPKA Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 426 TAHUN 2014  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK KOTA PADANG TAHUN 2014

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PADANG  
TAHUN 2014

NO	Partai Politik yang memperoleh kursi pada pemilu Tahun 2009	Jumlah Kursi	Jumlah Perolehan Suara Sah	Nilai bantuan persuara	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Partai Demokrat	17	111,469	2,683	174.458.274.-
2.	Partai Keadilan Sejahtera	6	39,638	2,683	62.036.773.-
3.	Partai Amanat Nasional	5	39,205	2,683	61.359.092.-
4.	Partai Golongan Karya	5	29,413	2,683	46.033.796,-
5.	Partai Hanura	4	13,390	2,683	20.956.466,-
6.	Partai Bulan Bintang	2	13,916	2,683	21.779.700,-
7.	Partai Persatuan Pembangunan	3	12,571	2,683	19.674.663,-
8.	Partai Gerindra	2	11,631	2,683	18.203.484,-
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	7,174	2,683	11.227.908,-
Jumlah		45			Rp. 435.730.156

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 426 TAHUN 2014  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK KOTA PADANG TAHUN 2014

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PADANG  
TAHUN 2014

NO	Partai Politik yang memperoleh kursi pada pemilu Tahun 2014	Jumlah Kursi	Jumlah Perolehan Suara Sah	Nilai bantuan persuara	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Partai Demokrat	5	38.308	2,683	42.825.156.-
2.	Partai Keadilan Sejahtera	5	39,022	2,683	43.623.344.-
3.	Partai Amanat Nasional	6	36.389	2,683	40.679.870.-
4.	Partai Golongan Karya	5	39.658	2,683	44.334.339,-
5.	Partai Hanura	5	30.156	2,683	33.711.895,-
6.	Partai Bulan Bintang	1	14.485	2,683	16.193.023,-
7.	Partai Persatuan Pembangunan	4	32.378	2,683	36.195.906,-
8.	Partai Gerindra	6	44.538	2,683	49.789.773,-
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	20.219	2,683	22.603.157,-
10	Nasdem	4	20.543	2,683	22.965.362.-
11.	PKB	1	15.392	2,683	17.206.973,-
	Jumlah	45			Rp.370.128.793.-

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI